

**Prospek Pendidikan Politik di Era Reformasi**  
**Oleh Nasiwan<sup>1</sup>**  
(Dosen Fakultas Ilmu Sosial, UNY, email: iwan1uny@yahoo.com)

**Abstrak**

Memasuki paroh dekade keenam usia kemerdekaan bangsa Indonesia hingga di penghujung tahun 2009, bangsa ini belum berhasil menuntaskan formulasi tentang satu sistem pendidikan nasional yang disepakati secara permanen oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Indikator belum adanya konsensus yang permanen tentang formulasi sistem pendidikan nasional secara fenomenal dapat dibaca dari munculnya sikap pro dan kontra yang sangat luas menjelang disyahkannya Undang-Undang Republik Indonesia NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Persoalan tersebut jika dilacak lebih jauh akan sampai pada akar persoalan belum stabilnya bangunan sistem politik nasional (*floating state*) yang menjadi payung bagi sistem pendidikan nasional.

Dilihat dari perspektif politik rumusan tentang konsepsi sistem pendidikan nasional dan include didalamnya Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan produk dari kebijakan politik dari suatu sistem politik. Dalam konteks keterkaitan antara sistem pendidikan nasional dengan sistem politik Indonesia yang menarik dipertanyakan lebih jauh adalah sistem pendidikan nasional di Indonesia tersebut dirumuskan ulang ditengah berlangsungnya reformasi politik yang sudah berlangsung memasuki satu dasawarsa (1998-2009). Merujuk pada gagasan besar demokrasi lebih khusus lagi perspektif tentang *civil society*, seharusnya rakyatlah yang memiliki otonomi untuk mengarahkan wacana dan memiliki kata putus tentang bentuk sistem politik nasional termasuk didalamnya tentang sistem pendidikan nasional yang disepakati oleh rakyat. Negara sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk mengajari kepada rakyatnya (yang lebih sering menjadi proses hegemonisasi) nilai-nilai – prinsip-prinsip kehidupan yang secara elitis dianggap baik. Kegagalan negara Indonesia melalui regim yang berkuasa untuk mengajari rakyatnya melalui P4 misalnya selama kekuasaan Orde Baru memberikan bukti yang kuat akan kebenaran proposisi diatas. Mengikuti alur logika berfikir seperti ini, maka kerja intelektual untuk mengikhtiarkan bagi hadirnya suatu model pendidikan politik yang mampu melahirkan suatu tipe warga negara yang mampu memberikan kontribusi bagi tercapainya suatu konsensus nasional permanen bagi lahirnya suatu sistem politik nasional adalah merupakan sebuah keniscayaan sekaligus langkah strategis untuk terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Prospek pendidikan politik akan sangat dipengaruhi oleh hadirnya Pendidikan Politik yang mampu melahirkan warga negara yang memiliki budaya politik baru, gagasan inovatif, memiliki sikap kritis pada kinerja sistem politik nasional, serta memiliki loyalitas pada hasil konsensus nasional, di negara yang bernama Indonesia baru. Cita-cita tersebut memerlukan kerja keras dan sistemik serta waktu beberapa generasi untuk mewujudkannya, sebagaimana dialami oleh bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu meraih kemerdekaannya. Paparan dalam tulisan ini akan mencermati dan menganalisis

---

<sup>1</sup> Nasiwan adalah Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

prospek Pendidikan Politik sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari reformasi politik nasional yang include didalamnya juga refomasi sistem pendidikan nasional.

## **Pendahuluan**

“ Negara (nation) yang bernama Indonesia dalam banyak hal, hadir dalam wajahnya sebagai komunitas yang terbayang, proses menjadi (*be coming*) yang belum selesai”<sup>2</sup>

Mencermati sejarah pelaksanaan Pendidikan Politik di Indoensia yang ada di persekolahan khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganeraan (PKN) maupun yang dilakukan oleh partai politik, baik pada masa pemerintahan Orde Lama maupun Pemerintahan Orde Baru sepanjang hampir 40 tahun, proses pendidikan politik memiliki nasib yang sama yaitu lebih sebagai instrumen kekuasaan. Pengalaman buruk pelaksanaan pendidikan politik yang diperalat menjadi sekedar instrumen kekuasaan regim, dalam waktu yang panjang telah menimbulkan akumulasi dampak negatif yang sangat tragis yaitu kegagalan pendidikan politik mencapai tujuannya yang sangat mulia untuk melahirkan warga negara yang baik, yang antarlain memiliki sikap loyal (memberikan support) kepada sistem politik nasional sekaligus juga memiliki sikap kritis.

Tidak berjalanya fungsi pendidikan politik oleh berbagai institusi politik di Indonesia yang seharusnya menjalankan tugas suci pendidikan politik, termasuk di dalamnya partai politik, diyakini serta secara emperis terbukti telah melahirkan suatu kehidupan partai yang didera berbagai persoalan serius. Berbagai persoalan pelik yang mendera kehidupan politik di Indonesia<sup>3</sup> mempertegas tentang urgensi pendidikan politik, termasuk di dalamnya tentang berbagai pilihan srategi-model pendidikan politik.<sup>4</sup>

Jika dicermati prjalanan bangsa Indonesia selama hampir empat dekade lebih sikap kritis, yang berakar pada adanya kemerdekaan berfikir (*liberty*) yang menjadi

---

<sup>2</sup> Pernyataan ini diilhami pesan dari tesis utama buku Benedict Anderson, *Imagined Communities*, Insist Press, Yogyakarta, 2001.

<sup>3</sup> Lihat, *Prisma* Vol.28. Juni 2009, hal 87-98, khususnya topik tentang” Partai Politik di Persimpangan Jalan ” Hasil survei yang dilakukan oleh LP3ES antara lain menemukan bahwa berbagai jenis partai politik seperti Partai Tradisional, partai dengan idealisme perjuangan, partai tipe organik continental yang menganggap masyarakat politik secara keseluruhan sebagai wilayah kerjanya, sudah mulai ditinggalkan masyarakat.

<sup>4</sup> Lihat, Kompas 60 Tahun Indonesia Merdeka edisi 16 Agustus tahun 2006, khususnya topik tentang “ Fragmentasi Politik dan Perilaku Parpol, hal 48.

jantung dari demokrasi telah terpenjara. Pada sisi lain yang lebih dimunculkan adalah sikap loyal yang tidak didasari oleh kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang sistem politik nasional. Kondisi kehidupan politik otoriter yang lebih menekankan loyalitas telah terbukti dengan sangat meyakinkan ikut memberikan kontribusi bagi kemandulan kinerja sistem politik serta ambruknya<sup>5</sup> bangunan sistem yang otoriter tersebut yang harus diakhiri oleh gerakan reformasi politik<sup>6</sup> sejak Mei 1998 hingga medio 2004 yang juga belum kunjung selesai. Dalam sistem politik yang otoriter pendidikan (politik) tidak lagi berfungsi untuk melakukan pencerahan pada masyarakat, ia bergeser menjadi instrumen pembodohan massal.

Kecenderungan yang ada menunjukkan semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada berbagai lembaga politik yang merupakan bagian dari sistem demokrasi. Indikator menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada salah satu lembaga politik yakni partai politik antara lain dapat dilihat pada adanya kecenderungan semakin bertambahnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya yakni jika pada Pemilu legislatif tahun 2004 ada 15,03% masyarakat yang mempunyai hak memilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, pada Pemilu legislatif 2009 meningkat menjadi 29,04%.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ambruknya bangunan politik Regim Orde Baru yang dibangun diatas dukungan kekuatan represif militer, politik logistik serta hegemoni ideology pembangunan pada tanggal 20 Mei 1998, dapat memberikan konfirmasi serta bukti empiris bahwa dengan terkekangnya kebebasan untuk menyampaikan pemikiran kritis atas kinerja pemerintah dalam dinamika kehidupan politik di Indonesia telah menyebabkan matinya mekanisme kontrol yang berfungsi untuk memperbaiki kesalahan atas kinerja system politik nasional sehingga tidak sampai terjadi akumulasi kesalahan yang berujung pada timbulnya krisis nasional yang berawal dari krisis kepercayaan pada regim.

<sup>6</sup> Gerakan reformasi politik yang dimulai sejak 1998 hingga 2004 untuk mengganti system politik ala Orde Baru dengan mesin politik utamanya Militer (ABRI), Partai Golkar dan Birokrasi yang berselingkuh dengan para tehnokrat dan pengusaha dari kalangan konglomerat hitam, nampaknya mulai dipertanyakan oleh rakyat akan berhasil dengan memuaskan. Indikator keraguan rakyat Indonesia pada reformasi politik sebagai bagian solusi dari persoalan rumit krisis nasional dapat dibaca pada hasil Pemilu di era reformasi baik pada Pemilu 7 Juni 1999 maupun Pemilu 5 April 2004 Partai Golkar meraih dukungan yang besar dari rakyat Indonesia, bahkan pada Pemilu 2004 Partai Golkar mampu keluar sebagai pemenang Pemilu nasional di Indonesia serta memenangkan di 27 Propinsi. Sementara itu partai-partai politik yang mengusung bendera eformasi kurang mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat sehingga tidak memiliki mandat yang memadai untuk terus melakukan reformasi politik. Hasil Pemilu 2009 memberikan bacaan bahwa partai politik yang menang adalah partai yang dibawah bayang-bayang tokoh mantan militer yakni Partai Demokrat. Sebuah partai politik yang tidak mengusung panji-panji reformasi, tetapi lebih mengambil jalan tengah.

<sup>7</sup> Lihat Lapaoran Kompas tentang ” Hasil Rekapitulasi Nasional dan Tingkat Partisipasi Pemilu tahun 2009”, kompas edisi 24 Juli 2009.

Kegagalan pendidikan politik termasuk didalamnya (PKN) dapat dielaborasi lebih rinci lagi, sebagai akibat dari kooptasi dan hegemoni regim yang otoriter antara lain dapat dilihat pada berbagai fenomena berikut ini;

1. Rendahnya daya tarik siswa pada mata pelajaran PKN
2. Tidak jelasnya substansi dan rincian materi PKN
3. Citra yang doktriner pada pembelajaran PKN
4. Sangat rentan dari intervensi kekuasaan
5. Tidak bisa membangkitkan rasa bangsa dan nasionalisme
6. Secara keilmuan masih dipertanyakan (debatable) pohon keilmuan yang menjadi payung dari Pendidikan Kewarganegaraan
7. PKN mewarisi dosa politik regim –regim otoriter yang pernah ada di Indonesia.

Belajar dari kegagalan pendidikan Kewarganegaraan selama Indonesia merdeka, menurut hemat penulis penting sekali dilakukan kajian yang objektif terhadap pelaksanaan pendidikan PKN di Indonesia disertai dengan adanya keterbukaan untuk menerima secara selektif model-model pendidikan politik dari berbagai ideologi besar yang hidup di dunia modern. Kajian tersebut tidak menempatkan PKN dalam ruang vakum, tetapi diletakan dalam konteks dan keterkaitannya dengan setting perkembangan sosial politik nasional serta pergeseran ideologi dunia. Dengan kerangka pembahasan tersebut lebih memiliki kemungkinan untuk menemukan alternatif formulasi pendidikan politik (PKN), yang dapat mencapai tujuan terpentingnya yaitu menumbuhkan nasionalisme tetapi sekaligus juga tetap memperhatikan perkembangan global. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi corak nasionalisme suatu bangsa pada dekade tertentu dan wilayah tertentu.

Untuk konteks Indonesia nampaknya masih perlu waktu untuk lahirnya suatu interaksi nasional yang permanen (*settlement consensus*) yang memiliki pijakan kuat pada budaya politik nasional yang matang tanpa membunuh sub-sub budaya politik lokal. Proses integrasi untuk lahirnya budaya politik nasional hingga akhir abad ke-20 nampaknya belum bisa terwujud bahkan setelah reformasi politik tahun 1998 yakni setelah runtuhnya Regime Orde Baru, ada kecenderungan simpul integrasi nasional nampak semakin terpecah-pecah dengan berbagai motivasi ada yang bermotivasi kedaerahan, agama, kepentingan ekonomi lokal, kepentingan elit lokal dll. Proses untuk

”Menjadi Indonesia” belum selesai. Proses menjadi Indonesia masih membutuhkan proses dialektika antara berbagai elemen.<sup>8</sup>

Proses panjang untuk bisa menjadi Indonesia yang bisa mengakomodasi seluruh elemen yang ada dan hidup di Indonesia, untuk terjadinya proses integrasi masih membutuhkan waktu,<sup>9</sup> walaupun dalam tiga kali Pemilu di era reformasi sejak Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, memberikan isyarat bahwa antara berbagai kekuatan politik yang diwakili oleh partai-partai politik yang ikut Pemilu sudah menunjukkan bukti empiris untuk bisa membentuk pemerintahan koalisi. Dengan lahirnya tradisi baru pemerintahan koalisi dalam tiga kali Pemilu setelah runtuhnya Orde Baru memberikan peluang untuk terjadinya proses saling mendekat antara berbagai kekuatan politik yang berbeda garis pemikiran politik dan ideologi sosialnya. Melalui pemerintahan koalisi memungkinkan untuk terjadinya proses moderasi ideologi sehingga lahirnya suatu konsensus antara berbagai kekuatan politik baik yang ada pada pemerintahan (the Rolling Party) ataupun yang ada pada posisi partai oposisi.

Bermunculannya partai politik yang jumlahnya mencapai 183 partai yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam Pemilu tahun 1999, yang kemudian menyisakan 48 partai yang ikut pemilu dan terus masih bertahan jumlahnya yang masih puluhan pada pendaftaran Pemilu tahun 2004 yang kemudian menyisakan 24 partai politik yang bisa ikut pemilu. Dan masih terus bertahan pada Pemilu tahun 2009 dengan jumlah mencapai 36 partai peserta Pemilu (gabungan antara 8 partai lokal di Aceh dengan partai nasional) dapat dibaca sebagai bukti empiris bahwa di Indonesia itu hidup banyak sekali aliran pemikiran politik dan sekaligus kelompok-kelompok kekuatan politik. Aliran-aliran politik dan kekuatan politik tersebut di Indonesia selama Indonesia merdeka hingga awal abad ke-21 yang telah mengadakan Pemilu sebanyak 10 kali ( Pemilu 1955, Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, Pemilu 1997,

---

<sup>8</sup> Lihat, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gausaf, *Menjadi Indonesia*, 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara, Mizan, Jakarta, 2006. Lihat juga, Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*. Pen. Kompas, Jakarta, 2006.

<sup>9</sup> Lihat, Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, Pen. PT Pustaka Utama Grafiri, Jakarta, tahun 1991.

Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009),<sup>10</sup> Nampaknya belum mampu mendorong untuk terjadinya pelembagaan politik ( Political institutionalisation) secara matang.

Belum matangnya proses pelembagaan politik di Indonesia juga dapat dilihat dari cairnya berbagai bentuk koalisi yang pernah terjadi dalam regim yang pernah berkuasa setelah reformasi tahun 1999. Pengalaman tiga kali Pemilu pasca reformasi tahun 1999 yang diikuti oleh terbentuknya kabinet hasil koalisi menunjukkan terjadinya bentuk koalisi yang terbelah antara koalisi di Kabinet dengan koalisi di Parlemen. Sering kali terjadi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah hasil koalisi tidak diikuti dukungan politik oleh partai pendukung koalisi yang ada di parlemen.

Disamping persoalan belum matangnya pelembagaan politik di Indonesia , sistem politik nasional Indonesia yang mengalami suatu keadaan yang disebut sebagai gejala "floating state", atau "failur state". Yakni suatu kondisi dimana ada gap yang dalam antara struktur politik Indonesia modern dengan kultur politik yang hidup di Indonesia. Sebenarnya kemungkinan untuk terjadinya gap antara struktur politik dan budaya politik juga terjadi pada negara-negara yang sudah terlebih dahulu menerapkan sistem politik demokrasi seperti juga halnya di Inggris, negara Amerika Serikat. Namun di dua negara yang sering dijadikan icon bagi demokrasi ini dalam perjalannya akhirnya terjadi proses harmonisasi serta proses pelembagaan politik secara bertahap. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh suatu masyarakat Indonesia terkait dengan masalah budaya politik dan struktur politik juga adanya kesenjangan antara struktur politik yang ada dengan kebudayaan politik yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan. Kesenjangan antara political culture dan political structure sering sekali terjadi pada masyarakat Indonesia bertambah kompleks, masyarakat Indonesia masih dalam masa transisi demokrasi.<sup>11</sup>

### **Beberapa Perspektif tentang *Political education***

---

<sup>10</sup> Lihat, *Almanak Parpol Indonesia* (API) Pemulku 1999. Eidisi Revisi. Lihat juga *Partai Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program*, Pen. Kompas, Jakarta. Tahun 1999. Lihat, *Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004*, Pen . Kompas, Jakarta. Tahun 2004. Serta *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Kampas, Jakarta. Tahun. 2004.

<sup>11</sup> Lihat, Chris Manning, *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Asp Reformasi Sosial dan Krisis*, LKiS, Yogyakarta, tahun 2000.

Penegasan tentang urgensi pendidikan politik political education antara lain disampaikan oleh Amy Gutmann<sup>12</sup>

“ ... we can conclude that political education -- the cultivation of the virtues, knowledge, and skills necessary for political participation--has moral primacy over others purposes of public education in a democratic society. Political education prepares citizens to participate in consciously reproducing their society and conscious social reproduction is the ideal not only of democratic education but also of democratic politics”

Adapun tentang berbagai perspektif tentang political education dan political socialization dari para sarjana yang memberikan perhatian pada bidang pendidikan politik kiranya dapat diikuti dalam uraian berikut ini.

Term *political socialization* dan *Political Education* menurut pandangan John J. Patrick, adalah merupakan term yang berbeda. Menurut John J. Patrick *Political socialization refers to the process by which people learn to adopt the norms, values, attitudes, and behaviors accepted and practiced by the ongoing system, political socialization refers to the individual's acquisition of his society's political culture or norms for managing “ the authoritative distribution of advantages and disadvantages”*. *The end towards which this process functions is the development of individuals who accept approved motives, habits, and values relevant to the political system of their society and who transmit these norms to future generations* (Stanley Allen Renshon, 1977:191)<sup>13</sup>

Pendapat lainnya, Ben Rosemond (2002: 58), tentang Political socialization as the process or the set of processes, through which people learn about politics and acquire political values. There is much dispute about which processes are significant and about when in the life cycle the most important socialisation takes place.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat Amy Gutmann, *Democratic Education*, Princeton University Press, Princeton New Jersey, 1999:287-291.

<sup>13</sup> Stanley Allen Renshon, *Handbooks of Political socialization Theory and Research*, The Free Press a division of Macmillan Publishing Co.. Inc. London, 1977.

<sup>14</sup> Ben Rosamond, *Politics: an introduction second edition*, Routledge, London, 2002.

Sementara itu sarjana lain Bay menyatakan bahwa *political education* lebih luas daripada *political socialization*, lebih lanjut dia menyatakan “ *as with all education, political science education must aim at liberating the student from the blinders of the conventional wisdom, from political totems and taboos, so that may make the basic choice of how to live and of political ideals as an independent person with optimal critical powers.*”

Sedangkan menurut Pranger, menyatakan bahwa “ a broad political education emphasizes the artificiality of political order and the citizen as creative actor within this order.” Pandangan yang senada dikemukakan oleh Entwistle, ia berpendapat bahwa “ political education , in contrast to socialization, should help youngsters learn to question basic assumptions of their polity and to consider alternative answers.

Perbedaan makna antara *political socialization* dengan *political education* sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi pengembangan kurikulum dan disain instruksional, antara *political socialization* dengan *political education*. Menurut John J Patrick, letak perbedaannya adalah bahwa *student of political socialization should be concerned primarily with question about the maintenance of political systems, about the transmission of political orthodoxy. They should ask how individuals learn to conform to the sociopolitical status quo so that political norms are observed and established political roles are performed.* Sedangkan pendidikan politik ( *political education*) memiliki perhatian yang lebih luas. Pendidikan politik tidak hanya membatasi individu untuk belajar mendukung tatanan politik yang berlaku, tetapi juga meminta individu untuk belajar menciptakan dan merubah tatanan politik.( They should ask not merely how individuals learn to conform so that political orders endure; but they also should ask how individuals learn to create and to change political orders) (John J Patrick, 1977:193).

Menurut pendapat Freed I. Greenstein, study tentang *political socialization* memiliki tempat dalam study ilmu politik di Amerika Serikat dimulai tahun 1968. Dari pelacakan yang dilakukan oleh Greenstein di kalangan para sarjana ilmu politik terdapat beragam pendapat tentang definisi dari *political Socialization*. Menurutny paling tidak ada empat perhatian tentang variasi definisi *political socilization*;

1. *The study of Children's political socialization orientations.* To define the study of political socialization as “ the political study of Children.”Nevertheless, just as “anthropology” is usually *defined formally* in abstract intellectual terms (as the study of “culture” or of “social structure”) but tends *informally to mean* “the study of nonliterate populations.” Political socializations also has a mundane operational definition; “the study of pre-adult orientations to the adult political process.”
2. *The study of the acquisition of prevailing norms.* Sometimes the phrase is used to apply quite narrowly to studies of the way the prevailing norms of a political system become the norma of the new members of that system. Here the usage parallels one of the meanings sociologists give to the more general term “socialization.” *The political subset of socialization is also sometimes called “politicization.”* In any event, the focus is on the acquisition of norm-consistent behavior.
3. *Sometimes “political socialization” is used more broadly to refer to the study of any political learning* what soever of conformity or deviance, and at any stage in the life cycle.”
4. *Finally, “political socialization” sometimes refers to actual observations of socialization processes,* in any of the above senses, taking into account both the socialized and the agents of socialization.<sup>15</sup>

Dalam konteksnya dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada warga negara dimaknai sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul, nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. (Alfian,1986:235). Pendidikan politik dalam konteks kegiatan pemilu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih (Alfian, 1990:245). Sementara itu Good merumuskan bahwa pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik (Dictionary of Education,1973: 67).

Rumusan lain dikemukakan oleh Ustman, pendidikan politik adalah upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, kemampuan berpartisipasi politik secara aktif dalam ikut

---

<sup>15</sup> Louis j. cantori, andrewH. Ziegler, Jr. *Political socialization a Note on the Ambiguity of Political socialization: Defenitions, Cruticims, and Strategics of Inquiry*, dalam *Comparative Politics*. P.191-192

memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik (Ustman, 2000: 87).<sup>16</sup>

### **Pendidikan Politik dan Reformasi Sistem Politik Nasional**

Berbicara tentang eksistensi Pendidikan Politik di Indonesia yang diselenggarakan secara formal melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya secara yuridis telah memiliki landasan yang kuat. Hal tersebut dikarenakan amanat untuk mengadakan pendidikan politik (PKN) sudah dituangkan dalam kesepakatan politik yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah yang dituangkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini khususnya pada Bab X pasal 37, antarlain dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan.<sup>17</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang ini, maksud diadakannya Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Jika eksistensi PKN hanya dilihat dari sisi adanya dasar hukum bagi diselenggarakannya mata pelajaran ini memang dapat dinyatakan bahwa keberlangsungan PKN di Indonesia sudah terjamin, minimal untuk beberapa tahun kedepan. Tetapi pengalaman memberikan pelajaran bahwa *daya hidup PKN* itu serta *prospeknya tidak cukup hanya bermodalkan memiliki landasan yuridis bagi penyelenggaraannya*. Untuk menopang eksistensi PKN didalamnya dibutuhkan adanya independensi dari intervensi regim yang berkuasa, materi yang standar, model pembelajaran yang kontekstual serta hadirnya kehidupan politik yang demokratis. Dengan rumusan lain dapat dinyatakan bahwa keberhasilan PKN tidak dapat berdiri sendiri, terkait dengan sistem pendidikan nasional serta sistem politik yang berlaku.

---

<sup>16</sup> Lihat juga Utsman Abdul Mu'iz, *Tarbiyah Siyasah 'Inda Jama'ah Al Ikhwan Al Muslimin*, terjemah, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, penerbit Intermedia, Solo, 2000

<sup>17</sup> Lihat Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Eksistensi dan prospek PKN di Indonesia meminjam perspektif Henry Giroux,<sup>18</sup> ketika berbicara tentang pengaruh ideologi dan kultur yang hidup pada suatu bangsa pada dunia pendidikan, dapat dinyatakan akan sangat dipengaruhi oleh Ideologi (paradigma) pendidikan yang dianut oleh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat dunia pendidikan. Mengikuti perspektif Giroux kegagalan Pendidikan Politik (PKN) di Indonesia yang telah diselenggarakan selama Indonesia Merdeka adalah ikut ditentukan dianutnya dominan paradigma konservatif dan liberal dalam ideologi pendidikan di Indonesia. Indikator yang sangat kentara dari dianutnya paradigma konservatif adalah menjadikan pendidikan sebagai alat untuk bisa mewariskan nilai-nilai yang dianggap mapan yang menguntungkan pihak yang berkuasa.

Sedangkan paradigma liberal yang berpandangan bahwa pendidikan berfungsi untuk menjamin tetap berfungsinya sistem ekonomi liberal juga sangat nampak dalam arah kebijakan pendidikan di Indonesia, bahkan penetrasinya sampai ke pendidikan politik. Misi pendidikan politik adalah untuk melakukan penjinakan pada pemikiran warga negara supaya mendukung proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan menjauhkan pelajar, mahasiswa dari dunia politik untuk menciptakan stabilitas politik. Dengan kata lain pendidikan (politik) menjadi disubordinasikan dari kepentingan pertumbuhan ekonomi. Proses pendidikan dengan misi seperti itu telah melahirkan suatu generasi bangsa Indonesia yang apatis pada masalah kebangsaan yang ikut memberikan andil pada munculnya krisis politik nasional.

Belajar dari kegagalan praktek pendidikan politik di masa Orde lama dan Orde Baru, pada masa kini dan mendatang (PKN) seharusnya sebagai bagian penting dari Pendidikan Politik ditengah berlangsungnya proses reformasi politik di Indonesia, memiliki peranan penting untuk ikut mendorong lahirnya budaya politik baru, untuk menuju Indonesia baru. Budaya politik baru yang berintikan pada lahirnya sikap kritis disatu sisi serta sikap loyal pada sistem politik nasional. Sikap kritis yang berakar pada adanya kemerdekaan bagi rakyat adalah merupakan ruh dari hidupnya kedaulatan di tangan rakyat. Budaya politik baru tersebut sangat dibutuhkan ketika bangsa ini diterpa

---

<sup>18</sup> Lihat Mansour Fakih, *Ideologi dalam Pendidikan*, kata pengantar pada buku *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, karya William F. O'neil, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

krisis multi dimensi, bangsa ini membutuhkan hadirnya generasi baru dengan semangat baru, gagasan yang cemerlang, generasi yang tercerahkan.

Krisis multi dimensi yang menimpa bangsa Indonesia<sup>19</sup> (Chris Manning, 2000:1) semenjak medio 1997 sampai tahun 2004 yang sudah berlangsung enam tahun, memberikan inspirasi serta menghentakkan kesadaran intelektual, untuk menanyakan lebih mendalam, tajam, dan sekaligus kritis, tentang suatu persoalan yang sangat mendasar yakni tentang eksistensi negara Indonesia, *inheren* di dalamnya bangunan politik Indonesia sebagai suatu *nation state*.

Pertanyaan kritis tersebut tidak hanya berhenti pada persoalan-persoalan yang bersifat permukaan seperti tentang kesalahan kebijakan pembangunan pendidikan, kebijakan ekonomi, kesalahan pilihan prioritas pembangunan di Indonesia, kesalahan model pembangunan politik, persoalan moralitas para penyelenggara pemerintah yang berujung pada lahirnya budaya KKN, tetapi lebih pada persoalan yang mendasar. Persoalan mendasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bangunan politik Indonesia. Dalam konteks ini, pertanyaan kritis tersebut sampailah pada suatu titik yang memberikan kemungkinan untuk lahirnya pemikiran kritis - alternatif tentang model bangunan politik Indonesia. Pemikiran kritis tentang bangunan politik Indonesia, untuk pada akhirnya melahirkan suatu perspektif teoritis yang orisinal menjadi keniscayaan mengingat sejak dekade 1990-an, nilai-nilai politik di Indonesia telah memudar dan kekuatan-kekuatan lain yang segera mengisi kekosongan tersebut, yaitu kesadaran etnis yang semakin meningkat dan peningkatan komitmen keagamaan terutama yang fundamentalis di wilayah-wilayah tertentu (Robert A Scalapino, 1996:1)<sup>20</sup>

Ikhtiar untuk sampai pada perumusan teori politik baru yang orisinal dapat dimulai dengan langkah pertama dengan menanyakan adakah kelemahan pada bangunan politik Indonesia ? Mengapa lumpuh, tak mampu bekerja efektif untuk menyelesaikan persoalan mendasar dan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini ? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah unsur-unsur utama yang membentuk bangunan politik Indonesia, bagaimana poses menjadi Indonesia, asumsi-asumsi apa yang ada di balik bangunan yang

---

<sup>19</sup> Chris Manning & Peter Van Diermen, *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, LkiS, Yogyakarta, 2000, hal. 1-15.

<sup>20</sup> Robert A. Scalapino, *Orasi Ilmiah* memperingati 25 tahun CSIS tanggal 18-19 September 1996.

bernama Indonesia tersebut? Dari manakah konsep tentang bangunan politik Indonesia yang berupa negara kebangsaan itu diambil? Apakah gagasan yang berupa barang import dengan segala kelemahan genetis yang dimilikinya tersebut masih mungkin dipertahankan? Adakah kemungkinan untuk lahirnya pemikiran alternatif tentang model bangunan politik Indonesia? Tulisan ini tidaklah berpretensi untuk menjawab semua pertanyaan di atas, tetapi berbagai pertanyaan tersebut kiranya akan membantu mengarahkan perhatian pembahasan dalam tulisan ini pada persoalan utama yang berkaitan dengan topik Indonesia sebagai *floating state*.

Urgensi untuk hadirnya pemikiran alternatif berupa perspektif teori yang orisinal mengingat seiring dengan berhembusnya era globalisasi yang dimulai pada akhir abad XX dunia mengalami perubahan besar-besaran dan fundamental melingkupi bangunan politik negara, bahkan sampai muncul ungkapan bahwa era globalisasi adalah merupakan *the end of the nation-state*. (Harry Tjan Silalahi, 2002:7)<sup>21</sup> Oleh karenanya merupakan tuntutan yang mutlak upaya pencerdasan dan pencerahan bangsa di Indonesia. Hal demikian karena sejak 40 tahun lebih bangsa Indonesia dalam masalah pencerdasan otak sebagai dimensi *kognitif* sudah lama tercemar oleh budaya politik yang serba hegemonik dan otoritarian. Akibatnya sangat parah, otak manusia Indonesia telah menjadi tawanan kepentingan politik sesaat melalui berbagai bentuk indoktrinasi yang melelahkan dan akhirnya melumpuhkan. Hanya sedikit orang Indonesia yang mampu mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan kreatifnya (Syafii Maarif, 2003:10).<sup>22</sup>

Dengan keberanian seperti ini memungkinkan untuk memiliki sikap terbuka untuk mendudukan serta mendiskusikan eksistensi *nation state* dalam kerangka khasanah puncak-puncak pemikiran dari peradaban bangsa lain, dengan tanpa beban namun dengan tetap bersikap kritis. Melalui energi kreatif –kritis dan independen dalam membaca fenomena kehidupan politik di Indonesia termasuk kapabilitas bangunan politiknya, akan diketahui bahwa berbagai perspektif teori politik khususnya tentang bangunan dan konfigurasi politik Indonesia selama ini adalah mengandung bias negara –regim Orde Baru- yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hegemoni kekuatan politik kapitalisme

---

<sup>21</sup>Harry Tjan Silalahi, “Pemahaman Baru Kebangsaan”, dalam” *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*”, Indra J. Pilang, Center for Strategic and International Studies, 2002:7

<sup>22</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Indonesia Pergumulan Antara Keprihatinan dan Harapan Masa Depan*, Pidato Dies Natalis UNY tanggal 21 Mei 2003.

internasional.<sup>23</sup> Bangunan politik yang memiliki karakter utama sekuler tersebut, ternyata telah gagal untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Bangunan politik Indonesia hingga awal abad dua puluh satu, belum menunjukkan sebagai sebuah bangunan politik yang mendapatkan dan memiliki dukungan dari basis nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia. Bangunan politik yang secara resmi diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahan-bahan bakunya tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur dasar yakni; *Pertama*, peradaban asli (*indigenous*) Indonesia yang masih goyah, belum mendapatkan tempat berpijak yang kokoh, *kedua* pengaruh Peradaban Islam, dan yang *ketiga* pengaruh peradaban Barat yang hadir melalui penjajahan.

Struktur sosial politik masyarakat Indonesia setelah mengalami perkawinan dengan pengaruh peradaban Barat yang dipaksakan melalui proses kolonialisasi, perkembangannya menjadi mengalami keterputusan rantai sejarah peradaban, termasuk musnahnya negara-negara pribumi<sup>24</sup> dan akhirnya mengidap kelemahan mendasar yaitu memiliki gap dengan budaya asli Indonesia, termasuk di dalamnya juga bangunan politik Indonesia yang lebih terasa tipikalnya sebagai barang import. Mungkin tidak berlebihan jika kondisi negara Indonesia yang demikian sampai hari ini, dilukiskan sebagai *the floating state*.

Terminologi *the floating state*, dalam konteks bahasan ini dipakai untuk melukiskan serta menggambarkan bahwa bangunan politik negara Indonesia sebagai sebuah *nation state* dengan segenap perangkatnya belum mendapatkan dukungan mantap dari mayoritas unsur bangsa Indonesia, baik dari sisi budaya, nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia, moralitas, adat, serta politik yang diturunkan dari nilai-nilai agama. Ini terbukti, bahwa sampai awal abad XXI masih ada resistensi yang muncul dari elemen bangsa Indonesia pada negara Indonesia, dalam berbagai bentuknya.

---

<sup>23</sup> Arief Budiman, "Theories of The Capitalist Nature of the State in Indonesia", Pierre James, "State Theories and New Order Indonesia", dalam *State and Civil Society*, Center of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990:5, 15, lihat juga Kalim Siddiqui, *In Pursuit of The Power of Islam*, khususnya pada bahasan tentang *Beyond the Muslim Nation State*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2002, hal. 114-127.

<sup>24</sup> Harsya W. Bachtar, "Integrasi Nasional Indonesia" makalah diterbitkan dalam buku dengan judul, *Wawasan Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran* Badan Komunikasi Pengahayatan Kesatuan Bangsa (Jakarta:BAKOM PKB Pusat, 1994:7-8).

Beberapa contoh yang sangat fenomenal adalah resistensi yang didasarkan pada etnisitas<sup>25</sup> dan agama seperti dengan Munculnya Gerakan Aceh Merdeka,<sup>26</sup> gejolak di Riau, keinginan sebagian orang Irian (OPM) untuk memisahkan diri dari Indonesia,<sup>27</sup> pemaknaan otonomi daerah yang justru menjadi pintu masuk bagi pemberlakuan syariat Islam,<sup>28</sup> seperti di Banten, Serang, Sulawesi Selatan, Cirebon,<sup>29</sup> serta keinginan untuk membangkitkan kembali berbagai kerajaan di Indonesia.

Ketercerabutan bangunan politik Indonesia tersebut secara menonjol ditandai oleh tiga karakter yang saling memotong.

*Pertama*, adanya penolakan dari sebagian kalangan bangsa Indonesia baik secara terang-terangan maupun terselubung terhadap kehadiran wajah Indonesia yang sekuler (*nation state*).<sup>30</sup> Hal ini antara lain dapat dibaca pada deretan panjang ceritera tentang pemberontakan (deligitimasi negara) dalam sejarah Indonesia. Proses deligitimasi melalui kasus DI/TII Kartosuwiryo,<sup>31</sup> Kahar Muzakar di Sulawesi, Daud Baureuh (PRRI) serta masalah Aceh yang sampai era reformasi ini belum dapat diselesaikan dengan baik oleh bangsa Indonesia.<sup>32</sup>

*Kedua*, penolakan terhadap khasanah tradisi politik yang diambil dari Indonesia atau yang dianggap berasal dari Indonesia, untuk dijadikan model bagi bangunan politik Indonesia.<sup>33</sup> Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari tidak adanya khasanah politik asli

---

<sup>25</sup> Indra J Piliang, "Dari Masyarakat Aliran ke Masyarakat Etnik", dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, CSIS, Jakarta, 2003:223.

<sup>26</sup> Kompas, Fokus, "Aceh antara GAM dan komoditas Politik" 4 Mei 2003:29.

<sup>27</sup> Kompas, 'Semangat Separatisme di Papua' tanggal 25 Februari 2003 hal 6

<sup>28</sup> "Otonomi Daerah, Selamat Datang Syari'at Islam" dalam *Jurnal Politik Akses* vol. 1, No. 1, Pebruari 2001.

<sup>29</sup> Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*, Logos, Jakarta, 2001:7-10

<sup>30</sup> Tentang konsep nasionalisme dan negara kebangsaan, lihat, Paul Gilbert, *the Philophy of Nationalism*, Westview Press, USA, 1998:4-8.

<sup>31</sup> Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Grafiti, Jakarta, 1990.

<sup>32</sup> Nazaradin Samsudin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989: 49-90.

<sup>33</sup> Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina -Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, (1985: 97-130). Lihat juga G. Mudjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*, Kanisius, Yogyakarta: 1987, hal. 15-101.

Indonesia yang dominan kemudian dipertahankan dan muncul menjadi model bagi bangunan politik Indonesia sekarang.<sup>34</sup> Hal ini berbeda dengan negara-negara besar lain seperti Inggris, Belanda,<sup>35</sup> Jepang,<sup>36</sup> Malaysia,<sup>37</sup> Thailand yang dalam derajat tertentu masih mampu mempertahankan dan memelihara warisan khasanah politik masa lalu untuk menjadi modal awal untuk membangun struktur politik modern yang mendapatkan dukungan dari nilai-nilai yang hidup pada komunitas tersebut. Dengan modal tersebut, mereka tidaklah membangun dari nol, dan bisa menghindari atau paling tidak mereduksi proses-proses yang a-historis.

Dengan kondisi yang tercerabut dari akar budayanya itu bangunan politik Indonesia menjadi rapuh, karena tidak memiliki tempat berpijak pada kesadaran hati atas nilai-nilai yang hidup pada bangsa Indonesia. Bangunan politik Indonesia menjadi mengapung dan tercerabut, bahkan menjadi proses transisi yang tidak berujung, hal tersebut menyimpan bom waktu yang siap diledakkan oleh sebagian warga bangsa yang termarginalisasi dari bangunan politik negara Indonesia tersebut, jika kondisi memungkinkan sebagaimana telah berkali-kali muncul dalam sejarah Indonesia.

*Ketiga*, bahwa sebagian warga bangsa Indonesia juga menolak model bangunan politik Indonesia yang berasal dari Islam, sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah Indonesia, misalnya dapat dibaca pada peristiwa *dead lock* sidang Konstituante ketika terjadi perdebatan dalam memilih dasar negara Indonesia itu apakah Pancasila, Islam, atau Sosialis.<sup>38</sup> Sejak Indonesia merdeka sampai dengan era reformasi, perdebatan

---

<sup>34</sup> Fachry Ali, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, Gramedia, 1986:150. Dalam derajat tertentu perspektif teoritis yang dipakai dalam kajian ini tidak sejalan dengan perspektif yang ditawarkan oleh Fachry Ali, yakni tidak menyetujui bahwa bangunan politik Indonesia Modern adalah merupakan pantulan dari konsep kekuasaan Jawa, yang terjadi adalah lebih pada politisasi simbol-simbol Jawa, bukan implementasi simbol-simbol Jawa dalam arti yang sebenarnya, yang berakibat merugikan bagi ada manipulasi dan distorsi pada konsep kekuasaan Jawa.

<sup>35</sup> Eva Etzioni- Halevy, *Bureaucracy and Democracy A Political dilemma*, Routledge dan Kegan Paul, London, 1983, Khususnya bab tentang 'The Development of Western bureaucracy : Overview and explanation, hal 101-28.

<sup>36</sup> Moore Barington, *Fasisme Asia: Jepang Revolusi dari Atas: Jawaban Kelas Penguasa terhadap Ancaman-Ancaman Lama dan baru*, dalam Sartono Kartodirdjo, LP3ES, Jakarta, 1984:185-212.

<sup>37</sup> Hussin Mutalib, *Islam dan Etnisitas Perspektif Politik Melayu*, LP3ES, 1996:1-15).

<sup>38</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Grafiti, Jakarta, 1995:102-118). Lihat juga A. Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan –Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta: 1985, hal. 139-142.

tersebut belum selesai tetapi masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang menggajal dan disebabkan oleh jawaban-jawaban yang mengambang.

Kasus pro–kontra tentang RUU Sisdiknas terutama pasal 13, tentang kewajiban sekolah formal untuk menyelenggarakan pendidikan agama, serta diajarkan oleh guru yang agamanya sama,<sup>39</sup> dapat dibaca sebagai masih tetap hidupnya pandangan yang menolak kehadiran agama (Islam) dalam wilayah publik dalam derajat yang berbeda dengan penolakannya pada Islam sebagai Ideologi Negara atau Piagam Jakarta sebagai dasar negara.

Kondisi kehidupan politik seperti dilukiskan di atas, dalam perjalanannya telah membawa Indonesia mengalami stagnasi, bangunan politik dan perangkatnya menjadi tidak berdaya untuk menggerakkan bangsa Indonesia ke arah kehidupan bangsa yang jaya, makmur, dan stabil.

### **Mengambangnya negara**

Untuk rumusan masalah yang pertama, tentang benarkah Indonesia sebagai *floating state*? Kerangka konseptual teoritik yang akan dipakai untuk memecahkan permasalahan ini dapat dikemukakan berikut ini. Untuk membuktikan “stateness” Indonesia dapat dilacak serta diukur dari indikator-indikator sebagai berikut; *Pertama* diukur dari daya terima (legitimasi) kekuasaan negara, untuk bisa menghegemoni. Jika negara memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyatnya ataupun kekuatan politik diluar negara berarti dapat dibaca bahwa negara tidak mengambang, akan tetapi jika legitimasi negara lemah, sehingga negara bisa memiliki daya terima yang kuat untuk melakukan hegemoni, maka dalam posisi ini negara memiliki indikator sebagai *floating state*.

Indikator *kedua*, dilihat dari kesepihakan dalam memaknai negara dan kekuasaan, kewenangan, perannya. Jika dalam memaknai negara itu sendiri, kekuasaannya, kewenangan dan perannya hanya diakui oleh negara saja, sementara itu elemen-elemen seperti kekuatan lokal, kekuatan politik Islam tidak bisa mengakui kewenangan dan peran yang melekat pada institusi negara, maka dapat dibaca bahwa negara tersebut mengalami *floating state*. Atau juga kewenangan negara itu hanya diterima oleh sebagian kekuatan

---

<sup>39</sup> *Suara Muhammadiyah*, “Bahaya Pendidikan yang Sekuler”, No. 09 Th ke- 88,1-15 Mei 2003, 29 Shofar-13 Rabiul Awwal, 1424 H, hal 8-9.

lokal sedangkan kekuatan lokal yang lain serta kekuatan Islam menolak, maka juga dapat diartikan bahwa negara dalam derajat tertentu mengalami *floating state*. Dengan rumusan lain dapat dinyatakan bahwa jika elemen-elemen negara yang diwakili antara lain oleh kekuatan politik lokal dan politik Islam dapat menerima kewenangan serta peran yang melekat pada negara maka negara tersebut *bukan termasuk floating state*.

Indikator yang ketiga, dilihat dari kesesuaian antara visi lokal dengan visi nasional, kesesuaian visi etnis dengan visi nasional, kesesuaian visi Islam dengan visi nasional. Jika tidak ada kesesuaian antara visi lokal, visi etnis, visi Islam dengan visi nasional negara maka dapat dibaca bahwa negara mengalami *floating state*. Dengan terjadinya ketidaksesuaian antara visi nasional negara dengan visi kekuatan lain yang diwakili oleh visi lokal, etnis dan Islam, maka berpeluang besar untuk terjadinya disfungsi institusi negara. Jika institusi negara mengalami disfungsi, tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya yang mendasar seperti menghadirkan rasa aman, memberikan hak hidup, menjamin kemerdekaan, melindungi hak milik, maka kehadiran negara tidak dirasakan kemanfaatannya, negara menjadi kehilangan alasan yang kuat untuk tetap ada dan beroperasi. Secara lebih konkrit disfungsi institusi negara tersebut dapat dilihat dari tidak berfungsinya pemerintahan yang ada, sebagai representasi dari institusi negara.

Perspektif lain yang dapat membantu untuk membaca apakah negara Indonesia mengalami *floating state* dapat ditemukan argumen dasarnya dari dua sisi, yang pertama dari tinjauan sudut sejarah terbentuknya negara Indonesia,<sup>40</sup> keterkaitannya dengan struktur sosial, sistem pendidikan, Hukum yang ada saat negara Indonesia terbentuk. Dengan model pembacaan seperti ini akan ada peluang untuk memahami bahwa sesungguhnya negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebenarnya dilihat dari sisi struktur sosial yang ada waktu itu, sistem hukumnya, sistem ekonominya, bahkan ideologi yang ada sudah didisain lebih dahulu selama beratus-ratus tahun oleh penjajah secara sistemis, sehingga ketika merdeka secara politik menjadi tidak

---

<sup>40</sup> Lihat Bantarto Bandoro, *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*, CSIS, Jakarta, 1995:1-40

banyak memiliki pilihan kecuali hanya meneruskan rekayasa sosial, politik, ekonomi, peradaban yang dilakukan oleh penjajah khususnya Belanda.<sup>41</sup>

Cara yang kedua untuk membuktikan bahwa negara Indonesia sebagai *floating state*, ialah dengan melihat bagaimana kerja lembaga ini serta reaksi penerimaan masyarakat Indonesia, semenjak didirikannya negara Indonesia sampai waktu terakhir yang mungkin untuk diteliti (1945-2004). Dengan mencermati reaksi berbagai kelompok masyarakat Indonesia misalnya kelompok yang bergabung dalam ikatan etnis tertentu, kelompok agama, negara-negara pribumi, akan dapat diketahui apakah negara Indonesia memperoleh dukungan yang kuat dari kekuatan-kekuatan tersebut.<sup>42</sup>

Dengan melakukan penggabungan dua model pembacaan sebagaimana dikemukakan di atas, memungkinkan didapatkan suatu perspektif teoritis alternatif tentang Indonesia sebagai *floating state*. Untuk menghasilkan kerangka yang orisinal tentang *floating state*, maka perlu dilakukan pengkajian secara mendalam pada dua hal sebagaimana telah disebutkan yaitu sejarah terbentuknya negara Indonesia kaitannya dengan struktur sosial yang ada pada saat itu serta tanggapan masyarakat Indonesia tentang kinerja Institusi yang bernama Indonesia. Penelitian ini berkepentingan untuk melakukan pengkajian pada hal tersebut.

### **Struktur Politik Indonesia Baru**

Kerangka teoritik untuk membedah permasalahan bagaimanakah konstruksi Struktur politik Indonesia Baru, dapat didekati melalui dua cara. Cara ini merupakan tindak lanjut dari kerangka teoritik yang ditawarkan untuk menjawab persoalan tentang mengapa negara Indonesia menjadi *floating state*? Cara yang *pertama* adalah dengan meneruskan proses menjadi Indonesia yang belum selesai, melalui proses pelembagaan yang sejauh mungkin dapat melakukan integrasi dengan kekuatan-kekuatan politik lain yang berada diluar negara, yang keberadaannya sudah ada lebih dahulu sebelum

---

<sup>41</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, Gramedia, Jakarta, (1990:36). Lihat juga H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, Jakarta, (1983:915)

<sup>42</sup> Untuk legitimasi Pemerintahan Orde Baru lihat Mochtar Pabottingi, "Dilema Legitimasi Orde Baru: Bayangan Krisis politik dan Arah Pemecahannya", dalam *Menelaah kembali Format Politik Orde Baru*, Gramedia, Jakarta, (1995:3-38)

berdirinya negara Indonesia. Kekuatan tersebut pada intinya direpresentasikan oleh kekuatan politik Islam dan kekuatan politik lokal.

Cara yang *kedua* ialah dengan menghilangkan sejauh mungkin terjadinya distorsi dalam proses pelebagaan serta proses integrasi. Dengan keberhasilan untuk mereduksi adanya distorsi dalam proses pelebagaan dan integrasi tersebut akan dapat dikurangi bahkan dihilangkan resistensi pada negara Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena elemen-elemen diluar negara merasa memiliki terhadap institusi negara Indonesia dan tidak memelihara kecurigaan akan kehilangan hak hidupnya.

Pembahasan dan analisis rumusan permasalahan yang ketiga adalah, bagaimanakah konstruksi bangunan politik Indonesia Baru yang kokoh (*settlement agreement*) memungkinkan untuk mendapatkan dukungan dari nilai-nilai sosial, budaya, moralitas dan agama di Indonesia? Kerangka teoritis untuk rumusan ini adalah sebagai berikut;

Bahwa perspektif tentang konsep *nation state* (negara kebangsaan Indonesia) sebagai pilihan yang sudah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia (elit politiknya) melalui keputusan politik BPUKI dan PPKI tahun 1945 menunjukkan bahwa bangunan politik yang didasarkan pada gagasan sekuler *nation state*<sup>43</sup>, yang pada awalnya merupakan perlawanan pada doktrin gereja, adalah tidak cocok dan ahistoris dengan kondisi di Indonesia. Mengapa demikian ? Hal ini dikarenakan Negara Indonesia berdiri dan merdeka, dalam perjalanannya justru telah banyak berhutang pada struktur religio politik. Khusus dalam perjuangan meraih kemerdekaan, Islam berperan penting. Peran tersebut cukup penting, baik dalam posisinya sebagai simbol perlawanan pada penjajahan yang memang bertentangan dengan doktrin ajaran agama Islam, maupun dalam hal keterlibatan tokoh-tokoh dari agama Islam dalam sejarah panjang mengusir penjajah (kaum kafir). Hal ini diperlihatkan dalam perlawanan lokal terhadap penjajah,<sup>44</sup>(Azyumardi Azra, 1999:283-293) melalui gerakan modern seperti Partai Sarikat Islam,

---

<sup>43</sup>Patrick Dunleavy and Brendan O'leary, *Theories of the State the Political of liberal Democracy*, Macmilan Education LTD, London, 1987. Lihat juga Bob Jessop, *State Theory Putting Capitalist States in Their Palce*, Polity Press, British, 1990.

<sup>44</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Mizan, Bandung, 1999:283-293, Mengemukakan bahwa perlawanan yang dilakukan untuk mengusir penjajah dari bumi nusantara telah dipelopori oleh kalangan ulama Islam seperti dipelopori oleh seorang ulama bernama Al -Palimbani dengan ajaran Jihadnya, yang ditunjukkan melalui kitab yang ditulisnya

MIAI, Partai Masyumi (Deliar Noer, 1995:144-179).<sup>45</sup> (Yusril Ihza Mahendra,1999:240-259)<sup>46</sup>

Dengan kata lain bangunan politik yang berakar pada negara kebangsaan, yang gagasan dasarnya diimpor serta dibawa oleh bangsa penjajah, memiliki dilema dan kontradiksi ketika akan dipakai oleh bangsa yang dijajah yakni bangsa Indonesia, untuk membangun struktur politik ketika meraih kemerdekaan. Dilema atau kontradiksi tersebut antara lain;

1. Asumsi-asumsi yang mendasari berdirinya *nation state* yang di dalamnya terdapat penentangan pada keterlibatan agama dalam wilayah publik (negara). Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh sebagian besar bangsa Indonesia yang religius, yang tidak pernah memisahkan keterlibatan agama dalam wilayah publik.
2. Agama sebagai struktur religio politik Islam, dalam kenyataan memiliki peran kesejarahan yang besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, yang dapat dilihat dari sisi penggunaan simbolnya, nilai-nilai, kelembagaan, maupun tokoh-tokohnya. Hal ini membawa konsekuensi sejarah atas kepemilikan hak untuk ikut mengatur, mengisi bangunan politik Indonesia.
3. Pembangunan politik dalam kerangka negara kebangsaan yang mensyaratkan adanya sekularisme sebagaimana telah dipraktekkan dalam pemerintahan Orde Baru yang ternyata berakhir dengan kegagalan, mendapatkan resistensi dari masyarakat Indonesia, serta telah menguras banyak energi bangsa, menimbulkan ketidakstabilan politik bahkan krisis nasional. Kasus GAM, Organisasi Papua Merdeka, RMS adalah ikon politik yang menunjukkan adanya resistensi pada negara nasional tersebut.

---

dengan judul, *Fadha'il Al-Jihad*, Kitab ini yang kemudian menjadi rujukan utama dari *Kikayat Perang Sabil* yang telah mampu mengobarkan semangat orang Aceh untuk menentang penjajah Belanda selama bertahun-tahun. Demikian juga Gerakan Kaum Padri di Minangkabau, yang juga dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam Tuanku nan Renceh (Tuanku Imam Bonjol).

<sup>45</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, LP3ES. Jakarta, 1995: 144-179). Juga lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Politik Nasional*, Grafiti pers, 1987: 44-98.

<sup>46</sup>Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi dan Jama'at Islami*, Paramadina, Jakarta, 1999: 240-259)

Dengan mempertimbangkan konsepsi di atas, maka perlu dirumuskan suatu kerangka teoritik tentang bangunan politik Indonesia baru, yang tidak mengapung di atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam hati masyarakat Indonesia.

Secara garis besar karakter bangunan politik Indonesia baru yang membumi di hati masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Bangunan politik modern yang tidak membunuh pemikiran dan khasanah politik yang hidup di Indonesia
2. Bangunan politik Indonesia baru tidak berangkat dari gagasan negara sekuler karena bertentangan dengan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia.
3. Bangunan politik tersebut merupakan perpaduan antara gagasan struktur religio politik dengan gagasan negara kebangsaan yang religius.

Perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti terdahulu yang sudah terlanjur mapan menjadi *main stream* berkaitan dengan bangunan politik Indonesia, pada umumnya tidak secara kritis mempertanyakan asumsi-asumsi, ideologi, serta konteks sosial kemasyarakatan di mana gagasan tentang negara kebangsaan itu dilahirkan. Pada umumnya bersifat *taken for granted* dengan perspektif teoritis yang sudah mapan bahwa gagasan tentang negara kebangsaan itu serta merta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam alam pikiran bangsa Indonesia. Sebagai akibatnya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema negara<sup>47</sup> (bangunan politik Indonesia) memiliki bias mendalam dengan teori politik barat yang sekuler, yang tidak memberikan tempat bagi agama dalam wilayah publik. Sebagai akibatnya penelitian tersebut gagal untuk membedah dan memecahkan persoalan yang tumbuh dan berkembang pada diri bangsa Indonesia secara akurat dan memadai. Analisis- analisis yang dihasilkan memiliki bias negara dan tidak secara objektif menempatkan variable agama (Islam) sebagai struktur religio politik. Padahal sebagaimana dikonstantasikan oleh W.F Wertheim (1999:255-264)<sup>48</sup> dalam bukunya yang monumental, ada berbagai macam penafsiran ide nasionalisme oleh kalangan-kalangan yang berbeda di Indonesia; kalangan Islam berbeda dengan kalangan priyayi, berbeda pula dengan pemahaman kalangan elit Indo tentang

---

<sup>47</sup> Lihat Purwo Santoso, "Bias epistemologis Konseptualisasi Interaksi Negara-Rakyat" dalam *Jurnal Ilmu sosial dan Politik UMY*, Edisi 1 Th.X. Februari 2001:1-17.

<sup>48</sup> W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition, a Study of Social Change*, (terj) Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial, 1999, Yogyakarta, Tiara Wacana.

nasionalisme. Gagasan nasionalisme (sekuler) dari awal telah mengundang sikap kritis terutama pada kalangan Islam. Kalangan Islam tidak bisa menerima begitu saja ide nasionalisme untuk dipakai sebagai ideologi gerakan dalam meraih kemerdekaan maupun untuk menata dan mendisain struktur Indonesia setelah merdeka. Hal demikian disebabkan kalangan Islam sebelumnya sudah memiliki ideologi sendiri yang karena sebab-sebab rekayasa dan pilihan penjajah Jepang yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan politik pada saat itu, lebih memilih gagasan nasionalisme beserta tokoh-tokohnya untuk mengelola negara Indonesia. Karena lebih mendapatkan angin dan kesempatan, gagasan yang kemudian lebih berkembang pada saat Indonesia merdeka adalah gagasan nasionalisme. (Harry J Benda, 1980:205-234).<sup>49</sup>

Untuk membahas rumusan permasalahan bagaimanakah konstruk bangunan struktur politik Indonesia Baru? dengan mengikuti kerangka konseptual sebagaimana dikemukakan di atas, agar bisa menghasilkan suatu kerangka teoritis yang orisinal membutuhkan eksplorasi yang mendalam dan luas tentang bangunan politik Indonesia yang berakar pada *nation state*. Asumsi-asumsi yang melatarbelakanginya, konteks sosial-politik kelahiran, *nation state* di Indonesia, perjalanan serta dinamika penerapan *nation state* di Indonesia. Dengan eksplorasi tersebut akan diketahui dengan mendalam karakter bangunan politik Indonesia yang berakar pada gagasan *nation state*, kelemahan dan kelebihanannya. Dengan cara seperti itu maka pada tahap berikutnya akan dapat diharapkan lahir suatu perspektif alternatif, tentang bangunan politik Indonesia baru. Meminjam ungkapan Syafii Maarif bahwa antara Islam, keindonesian dan kemanusiaan tidak saja bisa berjalan bersama dan seiring tetapi ketiganya dapat menyatu dan saling mengisi untuk membangun taman sari yang khas Indonesia.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Harry J Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1980)

<sup>50</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesian dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, Penerbit Mizan bekerjasama dengan Institute for Culture and Humanity, Bandung, 2009, khususnya hal 300-308.

## Penutup

Proses gelombang demokratisasi yang terjadi diberbagai belahan dunia tak terhindarkan juga memasuki wilayah Indonesia. Proses demokratisasi tersebut acapkali ditandai oleh ditumbangkannya regim lama serta system politik lama diganti dengan regim baru, serta system politik baru yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat. Proses penumbangkan struktur politik lama seharusnya diikuti dengan hadirnya proses institusionalisasi politik. Jika sampai terjadi proses penumbangan struktur lama tidak diikuti proses institusionalisasi yang berhasil maka proses demokratisasi memiliki kemungkinan besar untuk menemui kegagalan, dan tidak bisa berlanjut dengan proses konsolidasi demokrasi. Lebih dari itu ada kemungkinan tatanan masyarakat akan kembali lagi ketatanan lama yang otoriter. Hal tersebut dikarenakan proses demokratisasi secara faktual acapkali menimbulkan adanya ketidakaturan-anarkhisme, menurunnya jaminan keamanan, tidak secara cepat adanya bukti-bukti akan tiba saatnya saman kesejahteraan. Hal tersebut masih sering diperparah oleh adanya persaingan antara elit dengan arogansi politik yang tinggi, sulit untuk melahirkan consensus untuk melakukan proses konsolidasi demokrasi.

Dengan rumusan lain dapat dinyatakan bahwa proses demokratisasi yang seharusnya diikuti oleh proses konsolidasi demokrasi acapkali dalam realitas kehidupan politik sulit untuk diwujudkan. Fenomena politik seperti itu dapat mengurangi kepercayaan dan pesona demokrasi dimata rakyat, bahkan lebih jauh dapat menjerumuskan negara jatuh dalam posisi *floating state*, mengapung, lemah. Menghadapi persoalan pelik dan krusial tersebut salah satu jalan keluar yang dapat diusulkan adalah ***perlunya dirumuskan suatu model pendidikan politik yang mampu memamadukan antara aspirasi masyarakat serta dinamika global***. Lebih dari itu dituntut hadirnya suatu model pendidikan politik yang memiliki kekhasan Indonesia (*genuine Indonesia*) termasuk didalamnya adalah suatu model pendidikan politik yang merefleksikan nilai-nilai religius. Pendidikan politik yang mampu mendorong untuk berhasilnya proses ko-integrasi antara negara dengan struktur religio politik Islam,<sup>51</sup> Bukan model pendidikan

---

<sup>51</sup> Lihat Noah Fieldman, *Constitutionalism in the Muslim World*, dalam *Issues of Democracy, Constitutionalism and Emerging Democracies*, March 2004, Volume 9 Number 1, Page 33-37. Diantara tesis penting Dr. Noah Filedmen adalah bahwa antara Islam dan Demokrasi adalah tidak bertentangan. Sekalipun demokrasi memiliki pandangan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan sedangkan Islam

politik yang hanya merupakan copi dan derifat dari ideologi sekular yang bertentangan dengan ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut mempertimbangkan kondisi empiris masyarakat Indonesia yang religius serta adanya aspirasi politik seperti tercermin dari hasil pemilu sejak Pemilu 1955, 1999, 2004, serta Pemilu 2009, yang menunjukkan adanya kekuatan real struktur religio politik yang direpresentasikan oleh partai-partai politik yang berplatform religius.

Prospek PKN di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kontribusi PKN dalam melahirkan warga negara Indonesia yang memiliki budaya politik baru, yang mampu secara bersama-sama membangun consensus normatif maupun prosedural dalam rangka mewujudkan bangunan politik Indonesia baru yang modern tetapi sekaligus memiliki ikatan yang hangat dalam hati bangsa Indonesia.

---

memiliki pandangan bahwa Allahlah yang memiliki kedaulatan yang diwujudkan dalam bentuk hukum Allah, tetapi dalam implementasi kehidupan manusia muslim, ajaran Tuhan tersebut diberikan kebebasan kepada manusia untuk menafsirkannya sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban masing-masing sepanjang terkait dengan persoalan muamalah keduniawian merujuk pada ungkapan Nabi Muhammad Saw “*Antum ‘alamu bi umuri dnyakum*”, kamu sekalian lebih tahu tentang persoalan duniawi.

## Daftar Kepustakaan

Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Grafiti, Jakarta, 1995.

Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesian dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, Penerbit Mizan bekerjasama dengan Institute for Culture and Humanity, Bandung, 2009.

Ahmad Syafii Maarif, *Indonesia Pergumulan Antara Keprihatinan dan Harapan Masa Depan*, Pidato Dies Natalis UNY tanggal 21 Mei 2003.

A. Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan –Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta: 1985.

Arief Budiman, “Theories of The Capitalist Nature of the State in Indonesia”, Pierre James, “State Theories and New Order Indonesia”, dalam *State and Civil Society*, Center of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990

Amy Gutmann, *Democrati Education*, Princeton University Press, Princeton New Jersey, 1999

Allen Renshon, *Stanley Handbooks of Political socialization Theory and Research*, The Free Press a division of Macmillan Publishing Co.. Inc. London, 1977.

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Mizan, Bandung, 1999.

Bob Jessop, *State Theory Putting Capitalist States in Their Palce*, Polity Press, British, 1990.

Bantarto Bandoro, *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*, CSIS, Jakarta, 1995.

Ben Rosamond, *Politics: an introduction second edition*, Routledge, London, 2002.

Benedict Anderson, *Imagined Communities*, Insist Press, Yogyakarta, 2001.

Chris Manning & Peter Van Diermen, *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, LkiS, Yogyakarta, 2000.

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, LP3ES. Jakarta, 1995.

Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Politik Nasional*, Grafiti pers, 1987: 44-98.

Eva Etzioni- Halevy, *Bureaucracy and Democracy A Political dilemma*, Routlegde dan Kegan Paul, London, 1983.

Fachry Ali, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, Gramedia, 1986:150.

G. Mudjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*, Kanisius, Yogyakarta: 1987.

Hussin Mutalib, *Islam dan Etnisitas Perspektif Politik Melayu*, LP3ES, 1996..

Harry Tjan Silalahi, “Pemahaman Baru Kebangsaan”, dalam” *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*”, Indra J. Pilang, Center for Strategic and International Studies, 2002

Harry J Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1980)

Harsya W. Bachtiar, "Integrasi Nasional Indonesia" makalah diterbitkan dalam buku dengan judul, *Wawasan Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran* Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Jakarta:BAKOM PKB Pusat, 1994).

Indra J Piliang, "Dari Masyarakat Aliran ke Masyarakat Etnik", dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, CSIS, Jakarta, 2003.

Kalim Siddiqui, *In Pursuit of The Power of Islam*, khususnya pada bahasan tentang *Beyond the Moslim Nation State*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2002.

Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gausaf, *Menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Mizan, Jakarta, 2006.

Kompas, Fokus, "Aceh antara GAM dan komoditas Politik" 4 Mei 2003

Kompas, 'Semangat Separatisme di Papua' tanggal 25 Februari 2003

Kompas 60 Tahun Indonesia Merdeka edisi 16 Agustus tahun 2006.

Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Grafiti, Jakarta, 1990.

Louis j. cantori, andrewH. Ziegler, Jr. *Political socialization a Note on the Ambiguity of Political socialization: Defenitions, Cruticims, and Strategics of Inquiry*, dalam *Comparative Politics*. P.191-192

Mansour Fakh, *Ideolog dalam Pendidikan*, kata pengantar pada buku *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, karya William F. O'neil, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*, Logos, Jakarta, 2001.

Moore Barington, *Fasisme Asia: Jepang Revolusi dari Atas: Jawaban Kelas Penguasa terhadap Ancaman-Ancaman Lama dan baru*, dalam Sartono Kartodirdjo, LP3ES, Jakarta, 1984

Mochtar Pabottingi, "Dilema Legitimasi Orde Baru:Bayangan Krisis politik dan Arah Pemecahannya", dalam *Menelaah kembali Format Politik Orde Baru*, Gramedia, Jakarta, (1995)

Nazaradin Samsudin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989.

Noah Fieldman, *Constitutionalism in the Muslim World*, dalam *Issues of Democracy, Constitutionalism and Emerging Democracies*, March 2004, Volume 9 Number 1

Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*. Pen. Kompas, Jakarta, 2006.

Paul Gilbert, *the Philophy of Nationalism*, Westview Press, USA, 1998

Patrick Dunleavy and Brendan O'leary, *Theories of the State the Political of liberal Democracy*, Macmilan Education LTD, London, 1987.

Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004, Pen . Kompas, Jakarta. Tahun 2004. Serta *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Kompas, Jakarta. Tahun. 2004.

*Prisma* Vol.28. Juni 2009.

Purwo Santoso, "Bias epistemologis Konseptualisasi Interaksi Negara-Rakyat" dalam *Jurnal Ilmu sosial dan Politik* UMY, Edisi 1 Th.X. Februari 2001

Otonomi Daerah, Selamat Datang Syari'at Islam dalam *Jurnal Politik Akses* vol. 1, No. 1, Pebruari 2001.

Robert A. Scalapino, *Orasi Ilmiah* memperingati 25 tahun CSIS tanggal 18-19 September 1996.

Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina -Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, (1985: 97).

Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Idonesia Baru*, Gramedia, Jakarta, (1990:36).Lihat juga H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, Jakarta, (1983)

*Suara Muhammadiyah*, “Bahaya Pendidikan yang Sekuler”, No. 09 Th ke- 88,1-15 Mei 2003, 29 Shofar-13 Rabiul Awwal, 1424 H,

Utsman Abdul Mu’iz, *Tarbiyah Siyasah ‘Inda Jama’ah Al Ikhwan Al Musli,min*, terjemah, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, penerbit Intermedia, Solo, 2000

Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition, a Study of Social Change*, (terj) Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial, 1999, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi dan Jama’at Islami*, Paramadina, Jakarta, 1999.